Focus Group Discussion Pertama: Penyusunan Kajian Kritis Penguatan Instrumen ISPO

LATAR BELAKANG

Sebaran Areal Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia, 2014

Ekstensifikasi Kelapa Sawit memicu Pro dan Kontra, selain menyumbang besar pada devisa negara kelapa sawit juga membawa dampak bagi hutan dan kawasan hutan di Indonesia, selain itu konflik sosial dengan masyarakat adat atau lokal di sekitar perkebunan kelapa sawit tidak dapat dihindarkan

Pada tahun 2009 melalui program moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen menyelamatkan hutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41 % pada tahun 2020 dengan dukungan internasional.

Pemerintah didorong untuk menerapkan sebuah instrument penilaian berdasar pada sistem keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berwawasan lingkungan yaitu ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

ISPO bersifat mandatory bagi seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia, Namun kenyataannya, sampai dengan Januari 2014 hanya 40 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO dari 2302 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki IUP di seluruh Indonesia. (Dirjenbun, 2015)

Deforestasi di Perkebunan Kelapa Sawit Periode 2009-2013

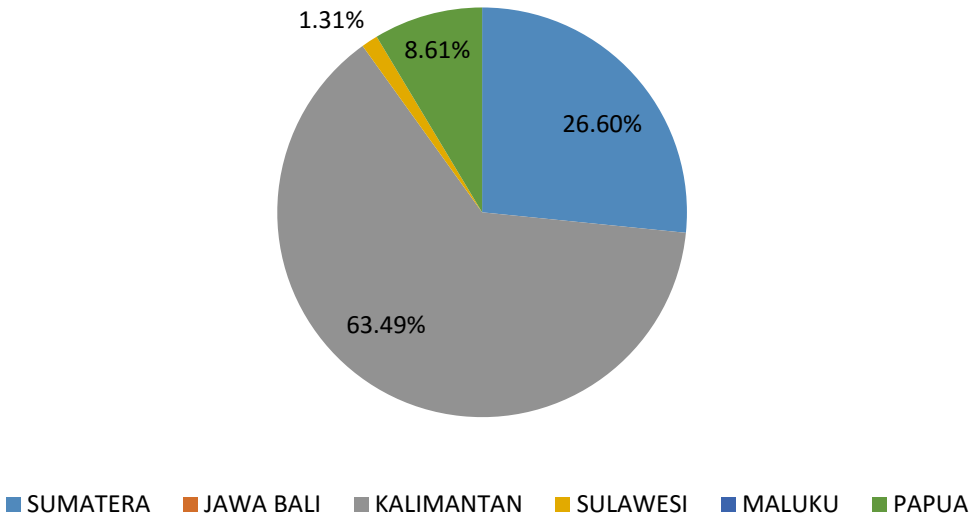

perkembangan perkebunan kelapa sawit ternyata juga membawa dampak buruk bagi hutan dan kawasan hutan di Indonesia. Pada kurun waktu 2009-2013, sekitar 516 ribu hektar lahan terdeforestasi di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2014

Dengan segala dampak yang ditimbulkan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, sudah seharusnya pembangunan yang dilakukan selalu berada dalam koridor benar. Dan dalam rangka pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, ISPO juga harus bisa menjadi instrument yang *transparan* dan *accountable* serta mampu untuk mencegah dan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Tujuan:

Diskusi ini adalah rangkaian kegiatan dari kajian yang dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan masukan terkait dengan sistem sertifikasi ISPO.

Keluaran:

Adanya catatan kritis sebagai bahan rekomendasi untuk penguatan sistem sertfikasi ISPO dalam upaya mencegah deforestasi dan konflik lahan.

CATATAN KRITIS

1. Sistem Sertifikasi ISPO
2. Prinsip dan Kriteria

Sistem Sertifikasi ISPO

Keterlibatan Pemantau Independen dalam hal ini adalah LSM dan masyarakat Lokal/ adat, bertujuan untuk memastikan kredibilitas sitem sertifikasi berjalan dengan baik.

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

ISPO memiliki 7 Prinsip dan Kriteria dan 127 Indikator, Berdasarkan kriteria dan indikator tersebut, lalu dikelompokkan kedalam 4 aspek. Karena berdasarkan aspek ini kami anggap penting dalam upaya mencegah deforestasi dan konflik lahan. Aspek dan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. ASPEK EKOLOGI

Masih memungkinkan dilakukannkanya proses landclearing terhadap tutupan hutan alam dalam konsesi perkebunan kelapa sawit.

2. ASPEK SOSIAL

Aspek sosial di dalam Prinsip dan Kriteria ISPO lebih menitik beratkan pada adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan sangat kurang melihat apakah program-program tersebut efektif menjawab permasalahan sosial sebagai dampak adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit.

3. ASPEK RANTAI PASOKAN

Untuk menjamin pasokan kelapa sawit berasal dari perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan seharusnya pemberlakuan sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi seluruh budidaya perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit.

4. PERSYARATAN LEGALITAS

Dalam prinsip dan criteria ISPO terkait dengan hal ini, tidak secara jelas menunjukan bagaimana proses pengakuan hak terhadap masyarakat adat / lokal. Bagaimana proses penyelesain masalah saling klaim ini dilakukan secara adil.